



PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, UMUR PEMERINTAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY

Satiman¹, Edon Ramdani², Suparmin³

Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
dosen01361@unpam.ac.id, dosen01372@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of government size, government age, and audit opinion on audit delay. Data is downloaded through the official websites of BPK and DJPK. The population in this study are all provincial government entities in Indonesia for the period 2018 – 2022, totaling 34 provinces. In order to obtain a sample of 170 data. Sampling in this study used a purposive sampling technique. Namely sampling technique based on predetermined criteria. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis with the help of the eviews 9 program. The results of this study conclude that government size and government age have an effect on audit delay. Meanwhile, audit opinion has no effect on audit delay. And simultaneously government size, government age and audit opinion affect audit delay.

Keywords : government size, government age, audit opinion, audit delay

1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlebih dahulu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat maupun lama tergantung dengan laporan keuangan yang dikerjakannya. Audit yang lama dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan keuangan (*audit delay*). Proses pemeriksaan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga menimbulkan *audit delay*. Adanya aturan pembatasan penyampaian pelaporan keuangan, peringatan tertulis, hingga denda atas keterlambatan tidak sepenuhnya mampu membuat perusahaan atau organisasi baik swasta maupun pemerintah konsisten tepat waktu dalam melaporkan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab sebuah perusahaan atau organisasi terkait tidak menyegerakan menyampaikan laporan keuangannya, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang menghambat perusahaan atau organisasi sehingga tidak bisa tepat waktu sesuai yang diharapkan (Saputra & Hari Stiawan, 2022).

Terdapat kasus yang menunjukan terhadap *audit delay* yaitu pada tahun pelaporan 2014 rata-rata *audit delay* atas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dari 33 provinsi adalah 162 hari. Pada tahun pelaporan 2015 *audit delay* mengalami penurunan rata-rata 161 hari. Pada tahun pelaporan 2016-2017 rata-rata *audit delay* menjadi 158 dan 157 hari. Pada tahun pelaporan 2018 rata-rata *audit delay* mengalami penurunan yaitu 156 hari (sumber BPK). Pada tahun pelaporan 2014 -

2018 masih terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami keterlambatan penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI (Vanesha & Syofyan, 2020).

Latar belakang penelitian ini disebabkan belum ditemukannya adanya penelitian terdahulu mengenai faktor umur pemerintah terhadap *audit delay*. Serta kebanyakan objek penelitian terhadap *audit delay* dilakukan pada sektor swasta yaitu pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan penelitian *audit delay* pada sektor publik masing-masing sedikit ditemukan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya juga menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Berdasarkan fenomena di atas, masih terdapat keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari batasan yang ditentukan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia karena skalanya lebih besar dari Kota atau Kabupaten. Dengan judul penelitian Pengaruh Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay.

2. Landasan Teori

Teori Kepatuhan

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegritaskan ide-ide dari model klasik dan partisipan manajemen (Panggabean & Maradina, 2023). Teori kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu sesuai target yang telah ditetapkan dan pada akhirnya mengharapkan imbalan atas pencapaian yang telah dilakukan (Rahmi & Sofyan, 2020).

Teori signal

Teori Signal menjelaskan bagaimana pentingnya suatu informasi yang disampaikan karena dapat memberikan pengaruh atau sinyal kepada pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan terkait dengan keberlanjutan. Manfaat utama dari teori ini adalah keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyajian Laporan Keuangan kepada pihak eksternal mengidentifikasi adanya signal atas informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam mengambil sebuah keputusan.

Audit delay dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan teori sinyal, apabila terdapat keterlambatan dalam penyajian Laporan Keuangan maka hal itu merupakan sebuah isyarat atau pertanda (sinyal) buruk kepada pengguna Laporan Keuangan. Jika suatu informasi tidak disampaikan atau dipublikasikan secara tepat waktu, hal ini mengakibatkan informasi tersebut akan kehilangan nilainya dan mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan (Eksandy, 2017)

Teori Stakeholder

Pada penelitian ini, bentuk pertanggung jawaban pemerintah ditunjukkan dalam pelaporan keuangan, dimana dalam prakteknya membutuhkan pihak ketiga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai penjamin akuntabilitas, kewajaran, serta transparansi laporan keuangan agar informasi dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Audit delay dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan teori stakeholder, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan hanya ditujukan kepada pemangku kepentingan

pemilik dari organisasi pemerintah tersebut. Melainkan juga kepada pemangku stakeholdernya yaitu masyarakat, wakil rakyat, Lembaga Pengawas, dan mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahap investasi, pinjaman atau donasi. Untuk itu ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tentulah sangat berarti.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang di olah dengan metode statistika. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melihat opini audit dan jumlah hari *audit delay*, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk melihat jumlah APBD masing-masing provinsi, serta undang-undang pembentukan daerah untuk melihat umur pemerintah provinsi di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan memberikan beberapa syarat atau kriteria. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan di audit oleh BPK RI periode tahun 2018 – 2022.
2. Pemerintah Daerah yang terdaftar di BPK periode tahun 2018 – 2022.
3. Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lengkap yang di gunakan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* periode tahun 2018 – 2022.

Definisi Operasional Variabel

Operasional variable diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala pengukuran dari variable-variable yang terkait dalam penelitian. Sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan judul penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variable dependen (variable terikat) dan variable independen (variable bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay yang dinyatakan sebagai variable Y. Adapun variable independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan opini audit. Dan dinyatakan sebagai variable X.

Teknik Pengumpulan Sempel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di www.bpk.go.id periode tahun 2018-2022.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan memberikan beberapa syarat atau kriteria. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji diperoleh hasil jumlah data yang digunakan sebanyak 170 data. Pada variabel dependen yaitu audit delay yang diukur dengan selisih jumlah hari pada tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK diperoleh nilai *mean* sebesar 143,7471. Kemudian untuk nilai median diperoleh sebesar 143,5000. Nilai maksimum diperoleh sebesar 209,0000 yaitu pada entitas pemerintah provinsi Maluku pada tahun 2019, merupakan provinsi terlama dalam menyampaikan laporan keuangannya. Dan nilai minimum diperoleh sebesar 97,0000 yaitu pada entitas pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021, merupakan provinsi tercepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 17,42407. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai *mean* audit delay lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data cukup baik.

Pada variabel independen ukuran pemerintah (X_1) yang diukur dengan logaritma natural dari total jumlah APBD diperoleh nilai *mean* sebesar 30851,15. Kemudian untuk nilai median diperoleh sebesar 30828,00. Nilai maksimum diperoleh sebesar 32513,00 yaitu pada entitas pemerintah provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, merupakan provinsi dengan total APBD paling banyak. Dan nilai minimum diperoleh sebesar 29600,00 yaitu pada entitas provinsi Kalimantan utara pada tahun 2017, merupakan provinsi dengan jumlah APBD paling sedikit. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 730,5888. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai *mean* ukuran pemerintah lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data cukup baik.

Pada variabel independen umur pemerintah (X_2) yang diukur dengan jumlah usia pemerintah tersebut menurut undang – undang pembentukan daerah provinsi terbaru diperoleh nilai *mean* sebesar 47,76471. Kemudian untuk nilai median diperoleh sebesar 49,00000. Nilai maksimum diperoleh sebesar 71,00000 yaitu pada entitas pemerintah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pada tahun 2021, merupakan provinsi dengan usia paling tua. Dan nilai minimum diperoleh sebesar 5,00000 yaitu pada entitas provinsi Kalimantan utara pada tahun 2017, merupakan provinsi dengan usia paling muda. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 21,20073. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai *mean* umur pemerintah lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data cukup baik.

Pada variabel independen opini audit (X_3) yang diukur dengan menggunakan data dummy yaitu nilai 1 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dan nilai 0 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian, opini Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat diperoleh nilai *mean* sebesar 0,976471. Kemudian untuk nilai median diperoleh sebesar 1,000000. Nilai maksimum diperoleh sebesar 1,000000 yaitu pada entitas pemerintah provinsi di Indonesia kecuali provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, provinsi Maluku pada tahun 2018, provinsi

Maluku Utara pada tahun 2017, provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Dan nilai minimum diperoleh sebesar 0,000000 yaitu pada entitas provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, provinsi Maluku pada tahun 2018, provinsi Maluku Utara pada tahun 2017, provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,152025. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai *mean* opini audit lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data cukup baik.

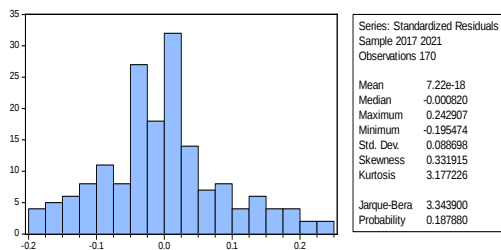
Model Regresi Data Panel

Uji Hausman

Dapat diketahui bahwa hasil uji hausman menunjukkan nilai probability pada cross-section random sebesar 0,0000 artinya nilai tersebut $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah FEM.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan nilai *probability* dari statistik *jarque-bera* sebesar 0,187880 hal ini lebih besar nilainya dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti telah terdistribusi secara normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -3702,588 + 0,131248 X_1 - 4,379397 X_2 + 6,531931 X_3 + e$$

Dari persamaan analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan :

1. Konstanta sebesar $-3702,588$ menunjukkan bahwa nilai variabel independen yaitu ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan opini audit sama dengan nol. Maka, nilai *Audit Delay* sebesar $-3702,588$.
2. Koefisien ukuran pemerintah sebesar 0,131248 bertanda positif. Maka, dapat disimpulkan apabila ukuran pemerintah naik 1% dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka, variabel *Audit Delay* akan mengalami kenaikan sebesar 0,131248.
3. Koefisien umur pemerintah sebesar $-4,379397$ bertanda negative. Maka dapat disimpulkan apabila umur pemerintah naik 1% dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka, variabel *Audit Delay* mengalami penurunan sebesar $-4,379397$.
4. Koefisien opini audit sebesar 6,531931 bertanda positif. Maka, dapat disimpulkan apabila opini audit naik 1% dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka, variabel *Audit Delay* akan mengalami kenaikan sebesar 6,531931.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji menunjukkan nilai *probability (F-Statistic)* sebesar 0,000003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan opini audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi *audit delay* atau model sudah layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut :

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap *Audit Delay*.

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan probabilitas ukuran pemerintah sebesar 0,0000 atau < nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *audit delay*.

2. Pengaruh Umur Pemerintah terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan probabilitas umur pemerintah sebesar 0,0000 atau < nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel umur pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *audit delay*.

3. Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan probabilitas ukuran pemerintah sebesar 0,4275 atau > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *audit delay*.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay*.

Dalam hal ini besar kecilnya jumlah APBD pemerintah provinsi mempengaruhi lamanya proses penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan, semakin besarnya jumlah APBD tentu membutuhkan waktu untuk proses perencanaan, pengelolaan, serta review laporan keuangan dan pengendalian internal yang cukup kuat sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

Kemudian semakin tua usia pemerintah provinsi tersebut juga mempengaruhi lamanya proses audit oleh BPK. Dikarenakan pemerintah provinsi yang berumur lebih tua tentu sudah memiliki pengalaman yang lebih dalam hal penyusunan laporan keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat mempersingkat waktu keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh BPK dibandingkan umur pemerintah provinsi yang lebih muda.

Opini audit yang diberikan oleh BPK dapat menentukan proses lamanya penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan, pemerintah provinsi yang telah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun sebelumnya tentu lebih teliti lagi dalam membuat laporan keuangan selanjutnya sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses penyampaian laporan keuangan oleh BPK.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap *Audit Delay*

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vanesha & Syofyan, 2020) yang mengatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay* hal ini dikarenakan semakin besar APBD yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin pendek *audit delay* yang terjadi. Pemerintahan daerah dengan APBD yang besar akan menerapkan teknologi informasi yang mutakhir pada perencanaan sampai dengan proses evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya, pengendalian internal yang lebih kuat serta pengawasan dari investor dan masyarakat sehingga *audit delay* dapat dihindari. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wafa & Nugraeni, 2018). Menurut (Payne & Jensen, 2002), ukuran kota yang besar akan mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal ini terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah daerah dengan APBD besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama.

Pengaruh Umur Pemerintah Terhadap *Audit Delay*

Penelitian ini membuktikan bahwa usia atau umur suatu pemerintahan tersebut yang diukur dengan undang – undang pembentukan daerah provinsi terbaru bahwa semakin tua umur pemerintah provinsi tersebut dapat menekan angka keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua tentu sudah memiliki pengalaman dan strategi guna mempersingkat waktu keterlambatan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan tersebut.

Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra Bakar dkk., 2019) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kemungkinan penyebab opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay* yaitu banyaknya pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang baik (WTP). Opini WTP yang diberikan oleh BPK dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah tersebut memiliki salah saji material yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan lebih cepat dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangannya kepada BPK dan diduga dapat mengurangi tenggang waktu *audit delay* yang terjadi.

Sebaliknya, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afriyani & Satyawan, 2023) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* di karenakan auditor yang menangani LKPD telah memiliki kompetensi yang baik serta profesional dalam memeriksa LKPD ini sehingga opini yang dikeluarkan oleh BPK tidak berpengaruh terhadap keterlambatan laporan keuangan. Opini yang diperoleh pemerintahan daerah berlandaskan dari hasil LKPD yang dinilai berdasarkan salah saji pada laporan tersebut. Sehingga tidak terpaku dengan waktu penyampaian LKPD kepada BPK

(Afriani dkk., 2016). Pada penelitian (Elfiana, 2018) juga menyebutkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya *audit delay* pada pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

1. Secara simultan variabel ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Umur pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Daftar Pustaka

- Afriani, B. R., Dudy, M., Program, S., Akuntansi, S., Ekonomika, F., Bisnis, D., Negeri, U., Jl, S., Ketintang, K., Gayungan, K., Surabaya, J., & Timur, I. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018 Analysis of Factors Affecting Audit Delay in Local Government Financial Statement in Indonesia* (Vol. 11, Nomor 2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/195>
- Afriyani, & Satyawan. (2023). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016 - 2018. *Jurnal Akuntansi UKUNESA*, 11, 195–204.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas dan Komite Audit terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Pada Tahun 2012-2015. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1.
- Elfiana, I. (2018). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay*.
- Panggabean, Y. M., & Maradina, J. (2023). *PENGARUH KUALITAS AUDIT, KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TIMELINESS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)*. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Payne, J., & Jensen, K. (2002). An Examination of Municipal Audit Delay. *Journal of Accounting and Public Policy* 21.
- Putra Bakar, M., Indra Arza, F., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., Akuntansi, J., & Ekonomi Universitas Negeri Padang, F. (2019). Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1168–1183. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/10>
- Rahmi, M., & Sofyan, E. (2020). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Ukuran Kap, Dan Peran Internal Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit*.
- Saputra, M. C., & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Earning Per Share, Dan Komite Audit Terhadap Audit Delay. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 269–277. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.953>
- Vanesha, A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit Dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) Terhadap Audit Delay Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah

Provinsi di Indonesia Periode 2014-2018). Dalam *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Nomor 4).
Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/29>

Wafa, Z., & Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, P. F. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA FACTORS AFFECTING DELAY AUDITS IN DISTRICT/ CITY GOVERNMENT IN INDONESIA*. 4(1).